

Agenda Utama Kabupaten/Kota:
PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR YANG BERMUTU



Oleh Mamat Supriatna*

BATAS TUNTAS

TAHUN 2008 merupakan batas akhir program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. Bagi Indonesia, batas akhir tersebut lebih cepat delapan tahun bila dibandingkan dengan kesepakatan *Education For All* (EFA) di Senegal, yang menargetkan tuntas pada tahun 2015 nanti.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Setara sebagai salah satu indikator ketuntasan Wajar Dikdas hingga tahun 2007 baru mencapai 92,52%, yang berarti masih kurang 2,48% untuk mencapai target APK tuntas paripurna sebesar 95%. Di samping itu, saat ini masih ada sekitar 963.891 anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan (Balitbang, Depdiknas, 2007). Angka tersebut diperoleh dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 12.890.334 orang pada tahun 2007 dikurangi jumlah siswa SMP/MTs/Setara 11.926.443 pada tahun yang sama. Bila jumlah anak usia tersebut dapat ditampung semua, maka APK akan mencapai 100%. Namun, didasarkan atas pertimbangan berbagai kondisi yang signifikan, tahun ini target yang dikejar sebesar 95%.

Apabila disimak kondisi Wajar Dikdas dari tahun 2003 hingga tahun 2007 mengindikasikan tingkat ketuntasan yang sangat menggembirakan. APK SMP/MTs/Setara meningkat 14,09% dari 78,43% menjadi 92,52%; kenaikan APK per tahun = 3,52%. Angka Partisipasi Murni (APM) meningkat 11,41% dari 60,19% menjadi 71,60%, kenaikan rata-rata APM = 2,85%. Angka Transisi dari Sekolah Dasar (SD) ke SMP meningkat sebesar 5,01% dari 86,77% menjadi

91,78%, kenaikan rata-rata per tahun = 1,25%. Sementara itu itu, Angka Putus Sekolah (*Drop Out/DO*) turun 0,98% dari 2,82% menjadi 1,84%, penurunan rata-rata per tahun = 0,25%. (*Lihat Tabel Indikator Wajib Belajar. Sumber: Direktorat Pembinaan SMP, 2008*).

**Indikator Wajib Belajar Sembilan Tahun
Tahun 2007**

No.	Indikator	2004	2005	2006	2007
1.	APK (%)	81.65	85.22	88.68	92.52
2.	APM (%)	61.72	63.67	66.01	71.60
3.	Angka Transisi SD ke SMP (%)	86.74	89.49	90.63	91.78
4.	Angka Putus Sekolah (%)	2.70	2.56	2.15	1.84

Dari empat indikator ketuntasan Wajar Dikdas tersebut hanya satu indikator yang boleh turun terus, yaitu Angka Putus Sekolah (DO). Indikator 1 – 3 harus diupayakan naik melalui berbagai program terobosan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk usia Wajar Dikdas (13-15 tahun) untuk memasuki pendidikan baik formal maupun non-formal, atau yang lebih dikenal sebagai program pemerataan dan perluasan akses.

KONDISI WAJAR KABUPATEN/KOTA

DALAM pengembangan program penuntasan Wajar Dikdas tingkat kabupaten/kota, seyogyanya diawali dengan identifikasi pencapaian APK tingkat kecamatan dan desa yang terlingkup. Langkah ini sangat penting terutama dalam kerangka merancang program yang bersifat *treatment* (perlakuan) bagi kecamatan atau desa yang akan dituntaskan. Di samping itu, hingga saat ini pada tingkat kecamatan dan desa sangat jarang tersedia data utuh tentang Wajar yang dapat diakses dengan segera; walaupun ada sering data tersebut diperoleh secara tidak terandalkan keakuratannya.

Selanjutnya, diidentifikasi pula posisi pencapaian APK kabupaten/kota dan tingkat di bawahnya dibandingkan dengan pencapaian APK tingkat provinsi dan nasional. Adapun kategori ketuntasan Wajar Dikdas telah ditetapkan semenjak tahap Perintisan Wajar Dikdas Sembilan Tahun (1989-1994), yaitu empat ketuntasan sebagai berikut:

- (1) tuntas pratama, bila APK telah mencapai antara 80% - 84%;
- (2) tuntas madya, bila APK telah mencapai antara 85% - 89%;
- (3) tuntas utama, bila APK mencapai 90% - 94%; dan
- (4) tuntas paripurna, bila APK mencapai 95% ke atas.

Adapun APK diperoleh dengan menggunakan rumus, misalnya untuk SMP/MTs/Setara pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah peserta didik SMP/MTs/Setara : Jumlah anak usia 13 – 15 tahun} \\ \times 100\% (11.926.443 : 12.890.334 \times 100\% = 92,52\%).$$

Berdasarkan rumus poerhitungan APK tersebut di atas, pada tahun 2007 teridentifikasi 440 kabupaten/kota dari 33 provinsi yang termasuk ke dalam lima kategori penuntasan Wajar Dikdas. Sebanyak 187 kabupaten/kota telah mencapai tuntas paripurna, 56 tuntas utama, 48 tuntas madya, 38 tuntas pratama, dan 111 (25,22%) kabupaten/kota belum tuntas (APK < 80%).

Ketuntasan Kabupaten/Kota*
Berdasarkan APK SMP/MTs/Setara

No.	Tingkat Ketuntasan	APK	Kabupaten/Kota
1	Tuntas Paripurna	≥ 95%	187 (42,50%)
2	Tuntas Utama	≥ 90% - < 95%	56 (12,72%)
3	Tuntas Madya	≥ 85% - < 90%	48 (10,90%)
4	Tuntas Pratama	≥ 80% - < 85%	38 (8,63%)
5	Belum Tuntas	< 80%	111 (25,22%)

*) Sumber: Direktorat PSMP, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas, 2008.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada kolom tingkat ketuntasan 1-4 pengkategorian selalu diawali dengan kata “Tuntas” yang melingkupi kabupaten/kota sejumlah 329 (74,77%). Namun, tingkat ketuntasan yang disandang oleh kabupaten/kota tersebut bermacam-macam, yang sering disebut dengan istilah disparitas atau ketidakrataan pencapaian APK antar kabupaten/kota.

Dalam upaya mencapai penuntasan paripurna, yaitu minimal APK 95% dapat dilakukan secara berjenjang. Direktorat PSMP (2008), mengajukan konsep penuntasan bertingkat bagi kabupaten/kota sebagai berikut.

1. Tingkat ketuntasan yang paling rendah adalah tuntas pratama, APK yang dicapai baru sekitar 80% s.d.84%.
2. Bila ketuntasan pratama telah terlewati, baru berusaha meningkatkan ke tuntas madya, dengan APK harus telah mencapai antara 85% s.d.89%.
3. Selanjutnya bila ketuntasan madya telah tercapai secara optimal, maka langkah berikutnya adalah mencapai ke tingkat ketuntasan utama, APK yang harus dicapai antara 90% s.d.94%.
4. Tingkatan tertinggi yang harus dicapai setelah tuntas utama adalah tuntas paripurna, dengan APK minimal harus sudah mencapai 95%.

Konsep itu tercetus setelah disadari bahwa Indonesia yang sangat luas dan beraneka ragam kondisinya, sulit untuk mencapai tujuan nasional secara seragam apalagi bila dituntut waktu tercapainya bersamaan.

Atas dasar konsepsi tersebut dalam mencapai ketuntasan paripurna ke depan, tiap daerah perlu mengambil langkah secara cermat sesuai kondisi masing-masing, yaitu:

1. Kabupaten/kota tertentu yang APK-nya masih jauh di bawah 80%, sasaran utamanya adalah bagaimana mampu mencapai ketuntasan pratama.
2. Kabupaten/kota yang lain yang saat ini telah mencapai ketuntasan pratama kegiatannya mengarah pada pencapaian ketuntasan madya.

3. Kabupaten/kota yang telah mencapai ketuntasan madya menuju ke utama dan dari yang telah tuntas utama ke paripurna.
4. Bila diinginkan bisa saja karena kondisi daerahnya sangat kondusif, langsung menuju sampai dua tingkat atau lebih.

Bila hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka berarti akan terjadi peningkatan jumlah siswa atau peningkatan APK, dan akhirnya secara nasional akan menunjang pencapaian tuntas paripurna.

Sebelum memulai langkah yang dimaksud, kabupaten/kota harus memahami dulu hal-hal sebagai berikut.

- Posisi tingkat ketuntasan saat ini, sehingga kita dapat tahu persis, bila ingin menaikkan 1 tingkat ketuntasan itu ke arah ketuntasan apa? Yang saat ini belum tuntas pratama harus ke pratama dulu, yang sudah pratama ke madya, yang madya ke utama, dan yang utama ke paripurna. Jangan berpikir dulu ke paripurna kalau tingkat ketuntasan masih di level bawah.
- Jumlah nominal anak yang menurut data belum mendapatkan pelayanan tingkat SMP/MTs/Setara, khususnya yang saat ini sudah tamat SD/MI atau DO SMP/MTs.
- Berapa banyak jumlah anak yang harus masuk SMP/MTs/Setara, sehingga angka APK dapat meningkat, untuk menuju tingkat ketuntasan di atasnya.
- Pola satuan pendidikan apa yang harus disediakan, sehingga dalam waktu beberapa bulan ini mampu mendongkrak peningkatan APK kabupaten/kota.
- Sarana dan tenaga pendukung apa yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik dengan dukungan Pusat maupun melalui APBD.
- Gebrakan dan terobosan yang perlu dilakukan, baik berupa kebijakan maupun rencana aksi.

PILKADA, KETAHANAN & MUTU WAJAR

DALAM euforia Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama ini kerap kali para kandidat menjadikan isu-isu Wajar Dikdas khususnya dan pendidikan pada umumnya sebagai sarana empuk merayu calon pemilih. Sebagaimana rayuan atau bujukan, yang disampaikan oleh para kandidat bukanlah esensi dari Wajar Dikdas dan pendidikan sebagai hajat hidup bangsa, melainkan berupa sentilan-sentilan

artifisial yang “sepertinya” akan menjadi penawar dahaga. Sebagai contoh: “Sekolah Gratis” , “Mari Upayakan Pendidikan Gratis Untuk Semua”, dan “Kita Tingkatkan Wajib Belajar 12 Tahun”. Kalau ada kesempatan dialog dengan kontestan, coba tanyakan: “Apa semua sekolah digratiskan?”, “Gratis untuk siapa, dan apanya yang gratis?”, “Apa sudah diperhitungkan besaran dan sumber dana untuk menggratiskan itu?”, dan “Kebijakan Pemda seperti apa yang akan mendasari pendidikan gratis untuk semua itu?”

Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota yang telah mencapai tingkat paripurna? Sudah barang tentu, bagi kondisi kabupaten/kota seperti itu selain harus lahir kebijakan dan program aksi yang melestarikan ketuntasan, juga harus dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan program Ketahanan Wajar Dikdas.

Alternatif atau upaya ketahanan dan mutu Wajar Dikdas tersebut tidak menutup kemungkinan bagi kabupaten/kota untuk melahirkan kebijakan tentang wajib belajar dari sembilan menjadi 12 tahun. Akan tetapi, apa arti mengejar wajib belajar 12 tahun, sementara Wajar Dikdas Sembilan Tahun tidak dipertahankan atau rendah mutunya? Artinya, tuntas bukan hanya membuka peluang dan mempertahankan anak usia Wajar Dikdas agar tetap bersekolah, melainkan proses pendidikannya dilayani secara bermutu, hingga ketika mereka lulus menguasai standar kompetensi sebagaimana yang diharapkan.

Agar ketuntasan Wajar Dikdas lestari dan bermutu, kabupaten/kota seyogyanya mengembangkan kebijakan tentang pelayanan pendidikan dasar yang bermutu hingga menarik minat siswa untuk menyelesaikan pendidikan pada tingkat itu, sekaligus berhasil mencapai standar kelulusan yang optimal.

Kebijakan yang dimaksud dapat dalam bentuk bantuan buku-buku gratis untuk sekolah dan siswa, pengembangan kategori sekolah yang bertaraf internasional dan sekolah yang memenuhi standar nasional, penyediaan beasiswa untuk pengembangan bakat/prestasi siswa, pembangunan perpustakaan atau pusat sumber belajar, laboratorium IPA, Bahasa, Komputer/TIK, dan penyediaan alat-alat laboratorium IPA. Dalam setiap program tersebut hendaknya dibarengi

dengan upaya penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik, baik profesional maupun finansialnya. Dalam hal ini, diperlukan Pemda yang dapat mengambil keputusan yang bijak dan didukung oleh kemampuan manajerial yang handal serta meraih jejaring kemitraan yang solid. Apabila sudah yakin menjalankan berbagai upaya atau ikhtiar, maka hasilnya bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa.***

**) Penulis adalah dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan tim konsultan Wajib Belajar, Direktorat PSMP, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas.*

Cimahi, 3 Mei 2008

Penulis : Mamat Supriatna

Alamat: Jl. Bina Bakti Nomor 22, Komplek Bumi Citeureup Permai (BUCIPER),
Cimahi 40512.